

FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

Andri Syahrul Arifin¹, Aan Anwar Sihabudin², Agus Nurulisyam³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: andrisyahrull26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fungsi Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran belum optimal, indikasinya yaitu masih kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memberikan motivasi, mediator dan aspirator keppada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari beberapa dimensi yang masih rendah seperti masih kurangnya Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya saat pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan, masyarakat kurang aktif dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan dan masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas seperti perbaikan jalan. Upaya-upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering mengadakan rapat di setiap dusun/wilayah agar masyarakat tidak segan segan dalam menyampaikan aspirasinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selalu menyadarkan masyarakat bahwa harus aktif dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan dan Pemerintah Desa memaksimalkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dilaksanakan ssecara merata.

Kata Kunci: *Fungsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Aspirasi, Desa, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 12 bahwa: Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya dalam membangun kesadaran masyarakat, kemandirian masyarakat, kesejahteraan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian,

pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pada Bab IX Pasal 78 Ayat 1 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah institusi yang memiliki peran, tugas dan fungsi dalam kegiatannya sebagai mitra kerja pemerintahan desa, penampung dan penyalur dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, merencanakan dan menyusun pelaksanaan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat maupun swadaya gotong-royong dalam pembangunan partisipatif untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) suatu lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk memadukan pelaksanaan dari berbagai kegiatan dan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di Desa. Dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di Desa, Masyarakat Desa dapat menyampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), selanjutnya Ketua RT menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada lembaga pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah masyarakat Desa

Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Hasil musyawarah yang telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat Desa, dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan Desa yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di Desa ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, adapun indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya melakukan mediator dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Contoh: Masyarakat kurang berpartisipasi dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan ditandai hanya sebatas perwakilan masyarakat 1 atau 2 orang saja.
2. Masih kurangnya memberikan motivator kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan Contoh: sehingga masyarakat kurang aktif dalam

kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan.

3. Masih kurangnya memberikan aspirasi LPM kepada masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Contoh: masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas seperti perbaikan jalan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : "Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran".

KAJIAN PUSTAKA

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut Badudu dan Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2013:412), mengemukakan "fungsi adalah jabatan atau kedudukan".

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Sule dan Saefullah (2016:8) mendefinisikan "fungsi-fungsi sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing

dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya". Menurut Rauf dan Munaf, (2015:20) "Lembaga kemasyarakatan pada hakekatnya dapat diartikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai *entry* sosial." Sirajuddin dkk. (2013:106-107) mengungkapkan bahwa Dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi.

Sumaryadi (2014:109) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyatakan bahwa LPM merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa baik itu dalam pembangunan desa, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa dimana lembaga ini berperan penting sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Misalnya masyarakat yang memiliki usulan, keinginan atau kehendak yang ingin disampaikan kepada pemerintah, peran dari lembaga inilah yang nantinya menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut, serta dalam meningkatkan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Adapun menurut Atmosudirjo dalam (Rauf dan Munaf, 2015:20) yaitu: Lembaga kemasyarakatan dalam aktivitasnya ikut membantu menjalankan fungsi pemerintahan, dengan sendirinya lembaga kemasyarakatan akan menjalankan fungsi administrasi, yang dalam hal ini administrasi pemerintahan. Administrasi merupakan suatu yang terdapat di dalam organisasi, atau istilah Atmosudirjo, pangkal tolak dari pada administrasi itu organisasi. Adapun definisi organisasi menurut Rauf dan Munaf, (2015:20) adalah “Kesatuan (*entry*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah bahasan relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan”. menurut Rauf dan Munaf (2015:215) fungsi LPM membantu tugas Kepala Desa sebagai:

1. Motivator masyarakat;
2. Inspirator pembangunan;
3. Mediator masyarakat dengan pemerintah; dan spirator masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*literature study*) dan studi

lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

- a. Motivator Masyarakat
 - 1) Merealisasikan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
Berdasarkan hasil peneliti dalam Merealisasikan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan mensosialisasikan tentang kemasyarakatan kemudian juga pembangunan termasuk juga didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. LPM ini berfungsi untuk memberikan pengarahan atau doron'gan sehingga bisa merealisasikan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. LPM juga berfungsi sebagai motivator mengarahkan atau mengajak supaya program program di desa dapat terealisasikan
 - 2) Meningkatkan swadaya gotong royong mendorong masyarakat

untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk meningkatkan swadaya gotong royong mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya yaitu dengan musyawarah dusun menampung aspirasi di dusun dari setiap RT masyarakat karang taruna. Hal apa yang sekiranya urgent atau juga membicarakan permasalahan apa yang sekiranya harus disampaikan ke desa. Terkait Gotong royong swadaya masyarakat tidak terlepas masih ada masyarakat yang kurang aktif untuk meningkatkan swadaya gotong royong mendorong masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dari berbagai keluhan kesah dari masyarakat. Hambatannya yaitu dalam meningkatkan swadaya gotong royong mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya sering kali masih ada masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dan sehingga masyarakat kurang aktif dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan hal ini disebabkan karena Masih kurangnya memberikan motivator kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. Upayanya yaitu dari dari setiap perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di setiap dusunnya sesekali memberikan pengarahan kepada masyarakat di tiap dusun/wilayah untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program

pembangunan hal ini dilakukan ketika ada agenda rapat dusun/wilayah.

3) Memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Untuk mengetahui adanya memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan dari LPM pasti ada saran atau motivasi kepada masyarakat terhadap pembangunan desa. Apalagi di desa Kertayasa adalah desa wisata yang ingin maju seperti desa desaa yang lain. LPM juga memberikan arahan terhadap PERDES yang akan diberlakukan di desa Kertayasa.

2. Inspirator Pembangunan

1) Adanya gagasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mengetahui adanya gagasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dengan adanya potensi alam salahsatunya yaitu desa wisata, dimana desa wisata ini sangat kerasa manfaatnya terhadap pendapatan daerah. Sehingga masyarakat pun harus lebih diberdayakan terhadap potensi yang ada di desa kertayasa.

2) Adanya kegiatan masyarakat yang sifatnya produktif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk mengetahui adanya kegiatan masyarakat yang sifatnya produktif menemukan ketika dilapangan Contohnya penunjang wisata dari desa Kertayasa yaitu UMKM makanan opak. Opak itu sampai kurang stoknya karena banyaknya yang minat. Hal ini diakibatkan ada beberapa faktor penghambat seperti SDM, alat alat. Kami selaku LPM memikirkan terhadap penunjang UMKM.

3) Adanya perencanaan untuk Menyusun satu kegiatan yang mempunyai prospektif membangun

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa untuk mengetahui adanya perencanaan untuk menyusun satu kegiatan yang mempunyai prospektif membangun seperti ketika ada rapat atau musyawarah biasanya suka dibahas terkait perencanaan-perencanaan untuk program yang akan dii laksanakan. Hal ini ssaling berkolaborasi bersama kepala dusun, aspirasi masyarakat ditampung Bersama sama. Untuk teknisnya sendiri dimusyawarahkan terlebih dahulu di tingkat wilayah/dusun Bersama LPM keemudian dibawa ke desaa untuk dimusyawarahkan kembali dan di putusan mengambil dari sekala terbanyak.

3. Mediator Masyarakat dengan Pemerintah

1) Adanya masyarakat ikut serta dalam rapat yang diadakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui untuk mengetahui adanya masyarakat ikut serta dalam rapat yang

diadakan di setiap bulan pasti ada agenda rapat baik di tingkat wilayah/dusun atau tingkat desa, masyarakat selalu ikut serta dalam rapat tersebut dan membicarakan terkait keinginan yang akan nantinya disampaikan oleh LPM. Dalam merencanakan pembangunan banyak stalkholder didalamnya pertama, LKD, dan LPM, RT/RW tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ssebelum nanti di buka di forum dan di bahass ada perwakilan tiap dusun unntuuk mengusulkan program dan dimusyarwarahkan bersama-sama.

Hambatanya yaitu dalam mengetahui adanya masyarakat ikut serta dalam rapat yang diadakan biasanya dari masyarakat hanya sebatas perwakilan dari setiap dusun. Upayanya yaitu perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering mengingatkan Kembali kepada masyarakat saat akan adanya rapat.

2) Masyarakat ikut memberikan informassi untuk berjalannya proses pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk masyarakat ikut memberikan informassi untuk berjalannya proses pembangunan biasanya dilakukan di tingakat dusun kemudian setelah menjadi usulan hasil musyawarah tingkat dusun langsung diberikan ke desa adapaun pemerintah desa tidak serta merta seluruh usulan dapat di cover dalam satu tahun anggaran pastinya kita menggunakan sekala prioritas yang ditentukan berdasarkan musyawarah ditingkat

desa. Bukan maksudnya mengabaikan hasil musyawarah di tingkat dusun hanya saja kita mengambil sekala prioritas di tingkat desa sesuai kondisi anggaran yang ada. LPM disini yang nantinya bertanggung jawab untuk membahas hasil keputusan di setiap dusun. Karena hasil musyawarah di tingkat dusun dibawa ke tingkat desa.

3) Menyampaikan usulan dari masyarakat untuk Pemerintah Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menyampaikan usulan dari masyarakat untuk Pemerintah Desa yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan Para Aparatur desa baik dari BPD maupun LPM serta perwakilan masyarakat biasanya berkumpul dan menyampaikan usulan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Setelah ada muasyawarah dusun lalu musyawarah desa, di musyawarah desa itu kami dilibatkan antaranya ketua LPM, ketua BPD, ketua RT dan Ketua RW. Disitulah ada musyawarah pembangunan desa kami menyampaikan aspirasi aspirasi baru disitu ada list perencanaan-perencanaan program yang akan dilaksanakan. Namun ketika dilapangan sendiri saat ada rapat di desa masyarakat cenderung tidak aktif dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya sehingga rapat desa kurang dilaksanakan dengan baik.

Hambatannya yaitu masih kurangnya Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya saat

pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan, hal ini terlihat ketika ada rapat di desa perwakilan masyarakat yang datang kurang aktif dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Upayanya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering kali mengadakan agenda rapat di wilayah/dusun namun rapat ini sifatnya informal jadi masyarakat tidak canggung lagi dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya.

4. Aspirator Masyarakat

1) Mengusulkan dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang lebih dibutuhkan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengusulkan dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang lebih dibutuhkan yang namanya dalam mengusulkan itu bukan berdasarkan kemauan tetapi dilihat pada kondisi di setiap dusun apakah itu bisa di bilang urgent dan atau bisa di tunda di tahun berikutnya. Ada presentasinya atau penilaiannya, dimana penilaian ini tetap kami mengacu terhadap banyaknya suara masyarakat mana dulu yang menjadi prioritas dan melihat ke urgentan kebutuhan masyarakat. Untuk usulan ini biasanya yang diajukan ada maksimal lima.

Hambatannya yaitu masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas seperti perbaikan jalan di daerah-daerah terpencil. Hal ini dikarenakan dari kurangnya dana dari pemerintah desa dan juga masih ada

keperluan-keperluan lainnya yang harus dilaksanakan. Upayanya yaitu Pemerintah Desa akan lebih memperhatikan lagi terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan. Sehingga akan diupayakan dengan cara kontinue atau dilaksanakan secara berkelanjutan.

2) Menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan dari musyawarah dusun ke musyawarah desa untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan dan nantinya di pilih dari sekala prioritas mana yang lebih diutamakan Jadi megambil suara terbanyaak. Kembali lagi melihat tergantung anggaran. Jika memungkinkan maka bisa terealisasi. Memang untuk sekala prioritas ini kita di ambil untuk dari yang urgent. Untuk usulan yang tidak menjadi sekala prioritas bisa nanti untuk kedepannya menjadi usulan kembali apakah di tahun depan dapat menjadi skla prioritas. Ini merupakan sebuah perenacanaan. Tetap nanti di sekala lagi apakah masuk di sekala priotas atau tidak.

3) Merencanakan program kegiatan pembangunan yang sifatnya memberdayakan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk merencanakan program kegiatan pembangunan yang sifatnya memberdayakan masyarakat seperti contoh ketika dalam pembangunan harus di bikin tim pengelola kegiatan bukan aspirasi LPM tapi LPM juga sangat membantu untuk menosialisasikan langsung kepada masyarakat. misalnya dari seksi perencanaan. Untuk keseluruhan kerja LPM itu menampung aspirasi masyarakat. misalkan ketika butuh aturan untuk lingkungan hidup itu bisa direncanakan. Untuk menyatukan seluruh elemen itu bisa disatukan dalam forum komunikasi desa wisata. Jadi bisa didiskusikan. LPM membangun kedekatan kepada masyarakat di lapangan secara struuktur. Lpm berfungsi sebagai alat lobi kepada desa. Sehingga LPM bisa menyentuh secara personal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian diketahui belum optimal. Hal ini dilihat masih kurangnya

Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya saat pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan, masyarakat kurang aktif dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan dan masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas seperti perbaikan jalan. Hambatannya yaitu Seperti Masih kurangnya melakukan mediator dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Masih kurangnya memberikan motivator kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan dan Masih kurangnya memberikan aspirator LPM kepada masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka upaya yang dilakukan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering mengadakan rapat di setiap dusun/wilayah agar masyarakat tidak segan segan dalam menyampaikan aspirasinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selalu menyadarkan masyarakat bahwa harus aktif dalam kegiatan swadaya gotong royong dalam setiap program pembangunan dan Pemerintah Desa memaksimalkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dilaksanakan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Munaf. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing, Pekanbaru. 356 hal.
- Saefullah, Kurniawan, (2016). *Pengantar Manajemen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sirajuddin, (2013). *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD*. Jakarta: YAPPIKA dan MCW.
- Sumaryadi, Nyoman I. (2014). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Syafiie, (2011) *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Usman. (2014). *Asas-Asas Manajemen*. Depok: Katalog Dalam Terbitan. (KDT).
- Widjaja, HAW. (2012). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada.